



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Imam Bonjol No. 61, Telp. (061) 4510082 - 4510083, Fax (061) 4568206

Website dishub.sumutprov.go.id – Email dishub.sumutprovinsi@gmail.com

MEDAN - 20157

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 800.1.11.1/001/DISHUB/IX/2026**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pasal 21 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat 2, setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik yang memuat nomor, ringkasan isi informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi, penanggung jawab pembuatan atau penertiban informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Daftar Informasi Publik.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

h. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

- i. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- j. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9);
- k. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/764/KPTS/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang dapat diakses dan Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tersebut dalam lampiran.;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 11 September 2026

Kepala Dinas Perhubungan



Yuda Pratiwi Setiawan, S.STP , M.SP
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19820407 200012 1 003

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 800.1.11.1/001/DISHUB/IX/2026

TANGGAL : 11 September 2026

TENTANG : DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat, Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala	Informasi Wajib Diumumkan Serta Merta	Informasi Wajib Diumumkan Setiap Saat	Informasi Yang Dikecualikan	Jangka Waktu Atau Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara										
a.	Sejarah	Informasi Ringkas sejarah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online		✓			Selama Berlaku
b.	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online		✓			Selama Berlaku
c.	Daftar Nama Staf beserta Jabatan	Daftar Nama Staf beserta Jabatan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online		✓			Selama Berlaku
d.	Tugas Pokok dan Fungsi	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provsu	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online		✓			Selama Berlaku
e.	Alamat Kantor	Informasi alamat dan nomor telepon Dinas Perhubungan Provsu	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online		✓			Selama Berlaku

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat, Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala	Informasi Wajib Diumumkan Serta Merta	Informasi Wajib Diumumkan Setiap Saat	Informasi Yang Dikecualikan	Jangka Waktu Atau Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. Program dan Kegiatan											
a.	Rencana Strategis 2025 s/d 2029	Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provsu	Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online		✓			Selama Berlaku
b.	Rencana Kerja Tahun 2026	Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provsu dari Tahun 2024 s/d 2026	Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online		✓			Selama Berlaku
c.	Rencana Program dan Kegiatan	Rencana Program Kegiatan Dinas Perhubungan Provsu Tahun 2026	Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online		✓			Selama Berlaku
d.	LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Provsu Tahun 2025	Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online		✓			Selama Berlaku
e.	Perjanjian Kinerja	Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provsu	Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online		✓			Selama Berlaku
f.	Ringkasan RKA	Ringkasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online		✓			Selama Berlaku

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

g.	Ringkasan DPA	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Provsu	Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online		✓			Selama Berlaku
h.	Foto dan Video	Foto dan Video Kegiatan Dinas Perhubungan Provsu	Tim Media Dinas Perhubungan Provsu	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online		✓			Selama Berlaku
i.	Rilis Berita dan Kegiatan	Rilis Berita dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provsu	Tim Media Dinas Perhubungan Provsu	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online		✓			Selama Berlaku
3. Laporan Keuangan											
a.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Provsu	Sub Bagian Keuangan	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online		✓			Selama Berlaku
b.	Daftar aset dan inventaris daerah	Daftar aset dan Inventaris Dinas Perhubungan Provsu	Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online		✓			Selama Berlaku
c.	Laporan Arus Kas (LAK)	Laporan Arus Kas Dinas Perhubungan Provsu	Sub Bagian Keuangan	Sekretaris	Medan, Januari 2026	Softcopy, Online		✓			Selama Berlaku

Kepala Dinas Perhubungan



Yuda Pratiwi Setiawan, S.STP , M.SP
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19820407 200012 1 003

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 800.1.11.1/001/DISHUB/IX/2026

TANGGAL : 11 September 2026

TENTANG : DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Jenis Informasi	Alasan Pengecualian (Dasar Hukum)	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi Akibat Jika Dibuka	Manfaat
1	2	3	4	5	6
1	Kepegawaian				
a.	Data Pribadi Pegawai : 1) Daftar riwayat hidup pegawai 2) Hasil general chek up kesehatan pegawai 3) Hasil evaluasi kapabilitas/ intelektualitas/kompetensi/rekomendasi pegawai 4) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 5) Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai 6) Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank pegawai 7) Catatan yang menyangkut pribadi seorang pegawai berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal 8) Biodata Elektronik PNS (Database) 9) Berkas dan Arsip Dokumen Pegawai 10) Dokumen Perceraian meliputi Identitas Pegawai yang mengajukan izin Perceraian/Perkawinan dan Dokumen Notulensi rapat Tim Penyelesaian Kasus Perceraian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi
b.	Penjatuhan Hukuman disiplin : 1) Surat panggilan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai 2) Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin pegawai 3) Berita acara pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin di dan/Lembaga n Hukuman Disiplin dari	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i bahwa dan j; - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 23 huruf g; - Peraturan Pemerintah	Sampai memperoleh persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dan Sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Bertentangan dengan praduga tak bersalah	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Balai
Sertifikasi
Elektronik

	Pejabat Berwenang 5) Laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dari Pejabat Berwenang 6) Berita acara beserta resume dan notulen sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin dari Badan Kepegawaian Provsu 7) Keputusan Hukuman Disiplin dari Badan Kepegawaian Provsu 8) Identitas pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin 9) Informasi lainnya terkait penjatuhan hukuman disiplin	Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 39 ayat (1) dan (2); • Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan • Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 57.			
c.	Data usulan formasi dan daftar rencana penempatan CPNS berupa : 1) Data usulan penempatan 2) Data usulan pemindahan 3) Data usulan pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum	Undang-Undang Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan i	Sampai memperoleh persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dan Sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Akan menghambat proses penempatan, pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	Mencegah Kolusi dan Menjaga iklim yang kondusif di lingkungan kerja
d.	Naskah Soal dan Naskah Hasil Tes CPNS/Ujian Penyesuaian Ijazah dan kenaikan pangkat/ Ujian diklat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Akan menimbulkan keresahan dan mengurangi keabsahan penilaian karena jawaban sudah dipersiapkan	Mencegah KKN
e.	Data Pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf j; 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;	Sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2. Keuangan dan Aset					
a.	1) Laporan Keuangan dan dokumen pendukung yang belum diaudit oleh BPK 2) Informasi tentang Wajib Pajak Daerah 3) Laporan Pajak Pribadi 4) Data Pihak Ketiga dalam SP2D	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah Pasal 172 ayat (1) dan (2);	1) Sampai mendapat persetujuan dan telah diundangkan dalam lembaran daerah 2) Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan selesainya proses	1) Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2) Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1) Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2) Menghindari kesalahpahaman terhadap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



		3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 302 ayat (1) dan (2)	pengadilan serta pemeriksaan keuangan oleh instansi yang berwenang		informasi di mata publik;
--	--	--	--	--	---------------------------

Kepala Dinas Perhubungan



Yuda Pratiwi Setiawan, S.STP , M.SP
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19820407 200012 1 003